



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

---

Tahun Sidang	: 2016 – 2017
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Senin, 30 Januari 2017
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.35 WIB s.d 17.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: Membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016.
Ketua Rapat	: H. Muhidin M. Said, SE, MBA
Sekretaris	: Hippi Hidupati, SE, MAP
Hadir Anggota	: dari 51 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta jajaran terkait lainnya.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 13.35 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada hari ini adalah membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.../Hal.2**

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

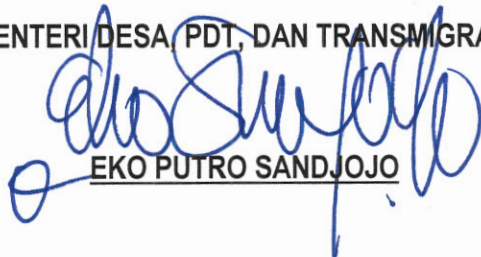
1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap serapan anggaran dalam APBN-P TA 2016 sebesar 93,74% dan meningkatnya capaian pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal.
2. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar segera mempercepat penyelesaian laporan penyaluran dana desa TA 2016, serta mengevaluasi proses perekrutan tenaga pendamping desa dengan tetap mengutamakan sumber daya manusia setempat.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengevaluasi mekanisme dan prosedur dalam penyediaan lahan di daerah tujuan transmigrasi agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.
4. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mendorong dan mengevaluasi pembentukan BUM Desa yang sesuai dengan potensi desa agar dapat menunjang peningkatan ekonomi desa secara optimal.
5. Komisi V DPR RI dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sepakat untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil-hasil kunjungan kerja dan masukan dari daerah pemilihan masing-masing anggota Komisi V berdasarkan skala prioritas pada tahun anggaran 2017, utamanya untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB.

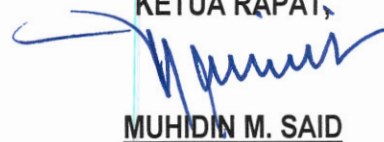
Jakarta, 30 Januari 2017

**MENTERI DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI**



**EKO PUTRO SANDJOJO**

**KETUA RAPAT,**



**MUHIDIN M. SAID**